



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI**

Tahun Sidang	: 2014-2015
Masa Persidangan	: IV
Rapat Ke	: 25
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
Dengan	: DPRD dan Bupati Halmera Utara
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Selasa, 9 Juni 2015
Waktu	: Pukul 12.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara / KK III)
Acara	: Audiensi/Konsultasi terkait usulan pembentukan Kab. Galela Loloda; Kabupaten Kao Raya; dan Provinsi Halmahera Raya
Ketua Rapat	: DR. Wahidin Halim, M.Si/ Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Minarni, SH/Kabagset Komisi II DPR RI
Hadir	: 8 Anggota Komisi II DPR RI
	1. DR. Wahidin Halim, M.Si (Wakil Ketua Komisi II DPR RI/F-PD)
	2. Rambe Kamarul Zaman (Ketua Komisi II DPR RI/F-PG)
	3. Arteria Dahlan /F-PDIP
	4. DR. IR Willy M. Yoseph, MM/F-PDIP
	5. Drs. H. Dadang S. Muchtar/F-PG
	6. Agung Widyantoro, SH.,M.Si/F-PG
	7. DR. H. MZ. Amirul Tamin, M. Si/F-PPP
	8. Drs. Tamanuri, MM/F-Nasdem

I. PENDAHULUAN

- A. RDPU Komisi II DPR RI pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2015 dibuka pada pukul 13.15 WIB yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, DR. Wahidin Halim, M.Si dan dinyatakan terbuka untuk umum.
- B. Ketua Rapat menyampaikan jadwal acara terkait dengan Konsultasi Pembentukan Kab. Galela Loloda; Kabupaten Kao Raya dan Provinsi Halmahera Raya.
- C. Ketua Rapat mempersilahkan kepada Bupati dan DPRD Kab. Halmahera Utara untuk memberikan penjelasan dan mempersilakan kepada Anggota Komisi II DPR RI untuk memberikan pertanyaan terkait dengan pemaparan yang disampaikan.

- D. Bupati dan DPRD Kab. Halmahera Raya memberikan penjelasan terkait dengan Rencana Penataan Daerah Kabupaten Halmahera Utara diantaranya;
1. Tujuan Penataan Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 31
Penataan Daerah ditujukan untuk:
 - a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan;
 - e. meningkatkan daya saing nasional dan daya saing Daerah; dan
 - f. memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya Daerah
 2. Ketimpangan Daerah Kawasan Indonesia Timur
 - a. Angka Harapan Hidup cukup rendah;
 - b. Angka Melek Huruf, rendah;
 - c. APK (Angka Partisipasi Kasar) Sekolah SD, rendah;
 3. Dasar Pertimbangan Penataan Daerah (Menyikapi Aspirasi Masyarakat)
 - a. Masyarakat Galela Loloda;
 - b. Masyarakat Kao Raya;
 - c. Masyarakat Halmahera Raya.
 4. Kepentingan Strategi Nasional (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 49)
Pembentukan Daerah berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional, berlaku untuk daerah perbatasan, pulau-pulau terluar, dan Daerah tertentu untuk menjaga kepentingan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 5. Proses Pemekaran Daerah
Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dalam Proses Pemekaran Daerah, antara lain;
 - a. Pembentukan DOB Kabupaten Galela Loloda dan Kabupaten Kao Raya telah memenuhi semua persyaratan di daerah yaitu:
 - 1) Aspirasi Masyarakat
 - 2) Keputusan DPRD Kab.Halmahera Utara
 - 3) Keputusan Bupati Halmahera Utara
 - 4) Keputusan DPRD Provinsi Maluku Utara
 - 5) Keputusan Gubernur Maluku Utara
 - 6) Buku Kajian Teknis (kelayakan DOB)
 - 7) Peta dari BIG
 - b. Pembentukan DOB Provinsi Halmahera Raya
 - 1) Sedang melakukan pemenuhan Persyaratan, diantaranya Buku Kajian Teknis (kelayakan DOB)
 - 2) Sedang melakukan pendekatan kepada para Bupati, DPRD dan Gubernur
 6. Hasil Analisis terhadap Pemekaran Daerah
 - a. Melakukan kajian sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang diperluas, khususnya pasal 49 dengan pertimbangan STRATEGIS NASIONAL
 - b. Melakukan analisis kualitatif dan kuantitatif

7. Rentang Kendali
Dengan terbentuknya Provinsi Halmahera Raya (wilayah bagian utara), maka Pemerintah Provinsi nantinya akan lebih fokus ke wilayah bagian Selatan saja sehingga rentang kendali pelayanan menjadi lebih pendek.
8. Pulau Terluar dan pertimbangan strategi nasional
Letak geografis calon Provinsi Halmahera Raya yang sangat strategis sebagai wilayah pulau terluar, yang merupakan bagian dari NKRI menjadikan Calon Provinsi Halmahera Raya ini perlu mendapat perhatian utama, khususnya dari sektor pertahanan. Sebagaimana diketahui, letak geografis suatu negara merupakan determinan yang menentukan masa depan bangsa dalam hubungan internasional
9. Daerah Maritim dan Illegal Fishing
Calon Provinsi Halmahera Raya sebagai daerah maritim, menempatkan wilayah ini memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap sektor kelautan, dan sangat logis jika ekonomi kelautan dijadikan tumpuan bagi pembangunan ekonomi. Kehadiran sebuah provinsi di wilayah ini diharapkan akan mempercepat upaya pemberdayaan masyarakat sebagai daerah maritim
10. Pariwisata Sejarah
Berdasarkan fakta sejarah, salah satu cakupan wilayah calon Provinsi Halmahera Raya adalah Pulau Morotai, yang memiliki sejarah tentang perang Dunia II. Napak tilas jejak **Jenderal MacArthur** cukup baik dan indah dilakukan di wilayah Morotai yang merupakan bagian dari calon Provinsi Halmahera Raya. Banyak peninggalan sejarah sebagai bukti betapa dahsyatnya Perang Dunia II yang juga ikut ambil bagian di wilayah Morotai ini
11. Dukungan Transportasi Udara
Dukungan transportasi udara di wilayah calon Provinsi Halmahera Raya, yaitu Bandara Kuabang Kao serta Bandara Galela di Halmahera Utara, Bandara Udara Buli di Halmahera Timur dan Bandara Udara di Morotai
12. Jalur ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia)
Wilayah ini dilewati jalur ALKI, yaitu menghubungkan antara Samudera Pasifik menuju Samudera Hindia, demikian juga yang menuju Laut Arafura sebagaimana sudah ditetapkan dalam PP No.37 Tahun 2002. Sehingga wilayah ini cukup strategis untuk diberi perhatian
13. Jalur Laut Nasional Primer
Wilayah ini merupakan jalur laut nasional primer yang menghubungkan ke Papua, melintasi Raja Ampat dan hingga ke Jayapura. Sehingga wilayah ini cukup strategis untuk diberi perhatian
14. Potensi Alam
Dukungan potensi alam yang cukup besar, khususnya tambang emas di wilayah ini juga diperkirakan akan menjadi daya tarik dan daya dukung yang besar terhadap pembentukan sebuah provinsi baru. Demikian juga potensi hutan, mineral dan perikanan yang cukup mendukung

15. Pengalaman Pemekaran Kabupaten/Kota di Maluku Utara
Pengalaman pemekaran kabupaten/kota di wilayah ini sangat dirasakan dampaknya oleh masyarakat, yang dapat dilihat dari semakin menggeliatnya roda perekonomian aktivitas perbankan, penambahan sarana dan prasarana
16. Pengalaman Pemekaran Provinsi lain
 - a. Provinsi Bangka Belitung dengan UU No.27 Tahun 2000
 - b. Provinsi Gorontalo dengan UU No 38 Tahun 2000
 - c. Provinsi Kepulauan Riau dengan UU No 25 Tahun 2002
 - d. Provinsi Sulawesi Barat dengan UU No 26 Tahun 2004
 - e. Provinsi Kalimantan Utara dengan UU No 29 Tahun 2012
17. Issu Strategis:
 - a. Daerah Perbatasan
 - b. Wilayah berada di jalur pelayaran nasional dan internasional
 - c. Percepatan pembangunan Indonesia Timur (Kalimantan Utara, Sulbar dan Gorontalo)
18. Kesiapan Calon Ibukota
Kesiapan calon provinsi Halmahera Raya juga didukung dengan kesiapan dan keseriusan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara (sebagai salah satu wilayah bagian calon Provinsi Halmahera Raya), menjadi pusat pemerintahan dengan menyediakan lahan yang cukup luas sebagai tempat pembangunan kantor-kantor pemerintahan provinsi yang diperlukan
19. Kesimpulan Umum
 - a. Pembentukan Calon Kabupaten Kao Raya dan Kabupaten Galela Loloda, telah memenuhi persyaratan, dan sudah siap menjadi daerah otonom baru.
 - b. Pembentukan Provinsi Halmahera Raya telah dilakukan kajian secara teknis dengan mengedepankan kepentingan strategis nasional
20. Kelengkapan Dokumen Persyaratan Pembentukan DOB
Pemkab Halmahera Utara telah melengkapi dokumen persyaratan yang dibutuhkan dalam pembentukan DOB, mulai dari persyaratan secara administrasi maupun teknis dalam bentuk buku kajian serta peta yang standar (*terlampir*). Bila masih ada kekurangan, Pemkab Halut senantiasa siap untuk memenuhinya.
21. Bupati dan DPRD Halmahera Utara mengharapkan dukungan dari DPR RI terhadap usulan pembentukan Kab. Galela Loloda; Kabupaten Kao Raya; dan Provinsi Halmahera Raya

II. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.35 WIB.

Jakarta, 9 Juni 2015

Wakil Ketua Komisi II DPR RI

ttd

DR. Wahidin Halim, M.Si

